PEKAN DEPAN, OMBUDSMAN JAKARTA RAYA PANGGIL RAHMAT EFFENDI

Rabu, 10 Oktober 2018 - P. Dika Arlita Kurnia Dewi

REVIEW, Bekasi - Pekan depan, Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya akan memanggil Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi dalam rangka memenuhi undangan klarifikasi terkait tindak lanjut Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) kasus penghentian layanan publik di 12 Kecamatan di Kota Bekasi.

"Minggu depan kita panggil, sesuai batas waktu yang telah kita berikan. Antara hari Selasa (16/10/2018) atau Rabu (17/10/2018)," ujar Ketua Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya kepada REVIEW, Rabu (10/10/2018).

Seperti diketahui, sebelumnya, pada Kamis (27/9/2018) Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya kembali memberi tambahan waktu kepada Wali Kota Bekasi, yang kini dijabat oleh Rahmat Effendi selama 14 hari kerja, untuk menjalankan tindakan korektif yang termuat dalam LAHP tersebut.

Tambahan waktu itu diberikan lantaran Rahmat Effendi mengaku belum menerima dokumen resmi LAHP dari para Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi sebelumnya.

"Secara umum, kami akan minta apa rencana tindaklanjut yg bersangkutan terhadap LAHP kami mau diberi sanksi atau tidak? Dan apakah beliau mau melakukan tindakan korektif kami atau tidak?" Jelas Teguh.

Apabila Rahmat Effendi menyatakan tidak berkenan memberi sanksi kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinyatakan bersalah dalam LAHP, maka kata Teguh, status LAHP akan meningkat menjadi rekomendasi.

"Kalau memang tidak mamu menjalankan LAHP kami, ya kami naikan statusnya ke Rekomdasi, supaya nanti bisa kami sampaikan ke Presiden dan DPR RI, utamanya ke Departemen Dalam Negeri (Depdagri)," pungkasnya.